

ANALISIS IMPLEMENTASI SISKEUDES BAGI PENINGKATAN STATUS KEMANDIRIAN DESA: STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)

Yore Isti Tosan Aji¹, Riatu Mariatul Qibthiyah²

¹ Biro SDM BPKP

ajiexercine@gmail.com

² Program PPIE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

riatu.mariatul@ui.ac.id

Abstrak

Pembangunan desa dan peningkatan status desa merupakan salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia. BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2015 guna mengawal desa khususnya terkait transparansi pengelolaan keuangan desa. Berbagai kalangan menganggap betapa pentingnya implementasi Siskeudes untuk mengelola keuangan desa. Berdasarkan Status IPD ternyata terdapat hasil yang positif di mana jumlah desa tertinggal mengalami pengurangan sebesar 6.518 desa dan desa mandiri mengalami penambahan sebesar 2.665 desa (BPS, 2018). Sampai saat ini masih sedikit penelitian yang membahas tentang dampak implementasi Siskeudes terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai dampak implementasi Siskeudes terhadap Perkembangan Status Desa sesuai Indeks Pembangunan Desa (IPD) per Kabupaten/Kota di Indonesia. Melalui penggunaan metode *First Difference* dengan data tahun 2014 dan 2018, kami menemukan bahwa implementasi Siskeudes berdampak secara parsial signifikan pada tingkat $\alpha=1\%$ terhadap perkembangan status desa. Meskipun signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi menunjukkan dampak yang relatif kecil. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam mendorong implementasi Siskeudes guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Siskeudes, Indeks Pembangunan Desa, Status Desa

Abstract

Village development and improving village status are among the main agendas of the Indonesian Government. BPKP together with the Ministry of Home Affairs built the Siskeudes Application in 2015 to guard villages, especially regarding the transparency of village financial management. Various circles consider the importance of implementing the Siskeudes in managing village finances. Based on the IPD status, there are positive results where the number of disadvantaged villages has decreased by 6,518 villages and established villages have increased by 2,665 villages (BPS, 2018). Until now, there is still little research that discusses the impact of the implementation of Siskeudes on the development of village status in Indonesia. This study aims to provide empirical evidence regarding the impact of the implementation of Siskeudes on the Development of Village Status per Regency/City in Indonesia. Using First Difference method between 2014 and 2018, we found that the Siskeudes implementation had a partially significant impact at level $\alpha=1\%$ on the development of village status. Although statistically significant, the regression coefficient shows a relatively small impact. This research is expected to give complement the previous studies. This research is also expected to give input for the village government in encouraging the implementation of Siskeudes in order to realize better, transparent and accountable village financial management.

Keywords: Siskeudes, Village Development Index, Village Status.

Keywords: Siskeudes, Village Development Index, Village Status

1. Pendahuluan

Pada saat Pemilu Presiden 2014, Jokowi dan JK selaku pasangan Capres dan Cawapres kala itu, mengusung visi misi agenda pemerintahan yang dikenal dengan nama Nawa Cita. Salah satu agenda pemerintahan tersebut berhubungan dengan pembangunan daerah dan desa. Lebih tepatnya di Nawa Cita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam suatu kerangka negara kesatuan. Desa memperoleh penguatan kewenangan melalui terbitnya Undang-Undang tentang Desa. Selain itu, Desa juga mendapatkan sumber pendapatan bukan hanya berasal dari desa itu sendiri.

Distribusi dana desa selalu meningkat hingga mencapai Rp219,05 triliun sejak mulai digulirkan di tahun 2015 hingga bulan Agustus 2019. Meski ada tren kenaikan dana desa, ternyata hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya 252 kasus korupsi anggaran desa selama kurun waktu 2015-2018. Pada tahun 2015 dijumpai 22 kasus, kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 48 kasus. Sementara pada tahun 2017 dan 2018 justru makin meningkat lagi menjadi 98 dan 96 kasus. Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang (15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017). Meskipun begitu, tidak semua pelaku korupsi adalah Kepala Desa. Pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa (ICW, 2018). Temuan tersebut menandakan betapa pentingnya upaya pengelolaan dan pengawalan keuangan desa sejak inisiasi dana desa.

Dalam rangka membantu mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, BPKP pada tahun 2015 bekerja sama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengembangkan

sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Berdasarkan survei BPKP di tahun sebelumnya, pengetahuan SDM perangkat desa masih sangat minim dalam hal keuangan desa, sementara dana yang harus dikelola di desa sangat besar. Siskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat dijadikan sebagai sebuah solusi. Adanya potensi salah pencatatan dan risiko kecurangan dapat diminimalisir melalui penerbitan laporan yang dihasilkan Siskeudes secara otomatis. Aplikasi Siskeudes sudah mengadopsi Sistem Pengendalian Intern dan digunakan oleh aparat desa dalam menatausahakan seluruh sumber keuangan desa, dalam hal ini bukan hanya Dana Desa yang bersumber dari APBN.

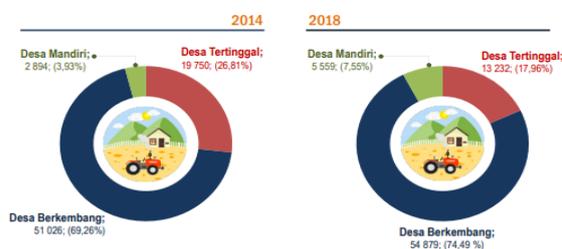
Selain didistribusikan secara cuma-cuma, Siskeudes juga memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, berbagai kalangan seperti Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, dan Ketua KPK menghimbau agar Siskeudes dapat diimplementasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Capaian implementasi Siskeudes sampai dengan bulan November 2018 per kabupaten/kota, desa, dan provinsi seperti tersaji pada gambar berikut ini.



Gambar 1 Capaian Implementasi Siskeudes
Sumber: BPKP sebagaimana dikutip dari situs kominfo.go.id

Salah satu usaha pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Desa adalah mengukur tingkat perkembangan desa. Bentuk upaya pengukuran tersebut adalah

melalui perumusan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Dalam jangka waktu lima tahun, terdapat beberapa sasaran pembangunan desa yang harus dicapai, salah satu di antaranya adalah pengurangan jumlah desa tertinggal hingga 5.000 desa dan peningkatan jumlah desa mandiri paling tidak 2.000 desa pada tahun 2019. Hasil pendataan potensi desa 2018 terbitan BPS menginformasikan adanya 73.670 desa yang dapat dilihat perkembangan dan diperbandingkan secara panel antara tahun 2014 dan 2018. Penyamaan desa antara tahun 2014 dengan 2018 dilakukan guna mengetahui perkembangan pembangunan desa di antara kedua tahun tersebut. Hasilnya menunjukkan ada pengurangan desa tertinggal sejumlah 6.518 desa dan penambahan desa mandiri sejumlah 2.665 desa.



Gambar 2 Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IPD 2014 dan 2018
Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa 2018, BPS (2018)

Siskeudes menawarkan berbagai keunggulan yang bermanfaat bagi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Berbagai kalangan juga menganggap betapa pentingnya implementasi Siskeudes untuk mengelola keuangan desa. Kemudian berdasarkan Status IPD ternyata terdapat hasil yang positif di mana jumlah desa tertinggal mengalami pengurangan sebesar 6.518 desa dan desa mandiri mengalami penambahan sebesar 2.665 desa. Namun begitu, masih sedikit penelitian yang penulis temukan membahas tentang dampak implementasi Siskeudes terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu tentang implementasi Siskeudes (Sulina et al., 2018);

Malahika et al., 2018; Nafi'ah, 2018; Welley et al., 2018; Pratiwi dan Pravasanti, 2020; dan Rondonuwu et al., 2020) menggunakan unit analisis paling tinggi di tingkat satu provinsi. Kemudian beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh dana desa terhadap indeks perkembangan desa baik IDM maupun IPD (Kuncoro et al., 2019; Maulana & Suryaningrum, 2019; Yulitasari & Tyas, 2020; dan Shalsabellah, 2020) masih memiliki beberapa keterbatasan dari sisi jumlah sampel yang bersifat lokal (paling tinggi pada level satu provinsi) dan minimnya variabel kontrol yang dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dampak implementasi Siskeudes terhadap perkembangan status desa per kabupaten/kota di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai dampak implementasi Siskeudes terhadap Perkembangan Status Desa per Kabupaten/Kota di Indonesia. Hipotesis utamanya adalah implementasi Siskeudes akan berdampak positif terhadap Perkembangan Status Desa. Perkembangan tersebut ditinjau dari kenaikan tingkat status desa yang dapat dianalogikan dengan penurunan jumlah Desa Tertinggal, kenaikan jumlah Desa Berkembang, atau kenaikan jumlah Desa Mandiri antar periode penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek. Kontribusi pertama berupa pembuktian secara empiris dampak implementasi Siskeudes terhadap Perkembangan Status Desa per Kabupaten/Kota di Indonesia. Kontribusi kedua dari studi ini adalah dapat melengkapi studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dari level pusat hingga desa dalam mendorong implementasi Siskeudes guna

mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

2. Landasan Teori

Konsep tentang Siskeudes

Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki implikasi besar terhadap peranan desa dalam mengurus tata pemerintahan dan melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dan dituntut lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya, tak terkecuali dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa yang dimiliki. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yaitu Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda berkomitmen untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU tentang Desa. Beberapa upaya yang dilakukan BPKP dalam pengawalan keuangan desa tersebut meliputi:

1. Peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa
2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) dan pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa)
3. Memberi masukan/saran kepada regulator
4. Monitoring dan evaluasi dana desa
5. Bimbingan teknis dan konsultasi pengelolaan keuangan desa

Dalam rangka membantu mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, pada tahun 2015 BPKP bekerja sama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengembangkan sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes (sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa) adalah aplikasi sederhana yang

dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang tersaji di dalam Siskeudes didesain sederhana dan user friendly sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengoperasikannya. Melalui satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, aplikasi tersebut dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Beberapa kelebihan yang ditawarkan Siskeudes adalah sebagai berikut (Kementerian Koinfo, 2018):

1. Mudah
Sekali entry akan menghasilkan laporan dan dokumen penatausahaan keuangan desa.
2. Disesuaikan Perkada
Siskeudes berbasis kabupaten/kota dengan menitikberatkan agar pengaturan lebih lanjut di dalam parameter dapat disesuaikan dengan perkada masing-masing.
3. Menyeluruh
Siskeudes mengelola seluruh sumber dana yang ada di APBDesa dan menghasilkan laporan per masing-masing sumber dana.
4. SPI
Siskeudes dilengkapi Sistem Pengendalian Internal.
5. Berkembang
Siskeudes selalu diperbaharui agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sejarah Siskeudes

Pada akhir tahun 2014 pasca UU tentang Desa dirilis, BPKP melakukan survei ke desa-desa di lima provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat variasi atas kondisi desa, mulai dari pemerintah desa yang masih minim sarana dan prasarannya, hingga pemerintah desa yang telah maju melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi (web/internet). Kualitas SDM perangkat desa rata-rata sangat minim dalam hal

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, sementara dana yang mesti dikelola di desa sangat besar. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong implementasi Siskeudes secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi Siskeudes secara bertahap.

Komisi XI DPR RI pada 30 Maret 2015 meminta BPKP untuk membuat aplikasi sederhana untuk pengelolaan Dana Desa. Senada dengan DPR RI, Presiden Joko Widodo pada 13 Mei 2015 meminta BPKP merancang sistem pengawasan anggaran Dana Desa yang efektif.

Periode akhir Juni 2015, BPKP melakukan piloting aplikasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mamasa kepada 168 perangkat desa. Selanjutnya, setelah sukses dalam uji coba, pada tanggal 13 Juli 2015 aplikasi di-launching dengan nama SIMDA Desa. SIMDA Desa kemudian digunakan secara nasional dengan kesepakatan berupa penambahan modul perencanaan dan pada tanggal 15 Agustus 2015 diganti namanya menjadi Siskeudes.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, Menteri Dalam Negeri RI bersama Kepala BPKP telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015 pada tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehubungan dengan MoU tersebut, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menerbitkan Surat Edaran Nomor 147/8350/BPD tanggal 27 November 2015 yang menginstruksikan kepada gubernur dan bupati/walikota agar Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) dan memfasilitasi penerapan Siskeudes di seluruh pemerintah desa secara bertahap. Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa dilakukan dengan pembiayaan APBD.

BPKP melakukan koordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Ketua KPK kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan SE B-7508/01-16/08/2016 tentang himbauan implementasi Siskeudes oleh desa-desa di seluruh Indonesia. BPKP juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam upaya penyebarluasan aplikasi tersebut. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi diberikan oleh BPKP bersama dengan The World Bank (Bank Dunia) kepada daerah yang telah mengimplementasikan Siskeudes (Kementerian Kominfo, 2017).

Pada bulan Januari 2017, BPKP menerbitkan Siskeudes Rilis 1.05 dalam rangka menyesuaikan dengan PMK terbaru Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Launching Siskeudes Versi 2.0 diluncurkan tanggal 21 November 2018 guna menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Konsep Indeks Pembangunan Desa (IPD) Penyusunan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dimaksudkan untuk menyajikan gambaran tingkat kemajuan dan progres pembangunan desa yang ada di Indonesia pada suatu waktu. Sistem pengukuran yang disebut Indeks Pembangunan Desa tersebut dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS (Bappenas, 2015).

IPD yang baik ditandai dengan adanya peningkatan nilai dalam kelima dimensi pembentuk IPD, yaitu peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan kondisi infrastruktur, transportasi/ aksesibilitas yang semakin membaik, peningkatan pelayanan umum, dan peningkatan pelayanan pemerintahan. Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan sebuah indeks komposit tertimbang dari 42 indikator penyusunnya, secara substansi

bersama-sama disusun dalam rangka memberikan gambaran tingkat perkembangan atau kemajuan desa. Besaran kontribusi masing-masing indikator penyusun IPD berbeda-beda dan menunjukkan tingkat pengaruh indikator dalam penyusunan nilai/skor IPD (Indeks Pembangunan Desa 2014 BPS, 2015).

Besarnya IPD nantinya akan memakai skala dari nilai 0 sampai dengan 100. Dalam rangka mempermudah pemahaman dan interpretasi, desa dikelompokkan menjadi tiga jenis kategori yakni desa tertinggal, desa berkembang, maupun desa mandiri. Desa tertinggal merupakan desa yang secara teknis mempunyai nilai IPD di bawah atau sama dengan 50. Sementara desa berkembang adalah desa yang secara teknis mempunyai nilai IPD di atas 50 akan tetapi di bawah atau sama dengan 75. Kemudian terakhir, desa mandiri secara teknis adalah desa yang mempunyai nilai IPD di atas 75 (Indeks Pembangunan Desa 2018 BPS, 2019).

Penelitian Sebelumnya

Sulina et al. (2018) meneliti tentang peran sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Penelitian Malahika et al. (2018) membahas tentang penerapan Siskeudes pada Organisasi Pemerintahan Desa dengan studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan prosedur penggunaan Siskeudes di Desa Suwaan sesuai prosedur, SDM sudah siap melaksanakan Siskeudes, dan pekerjaan lebih efektif dan efisien dengan Siskeudes.

Nafi'ah (2018) meneliti tentang implementasi dan evaluasi Siskeudes di Provinsi Jawa Timur dipandang dari sisi BPKP sebagai pembuat sistem dan Aparat Desa sebagai

pemakai sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes digunakan oleh BPKP sebagai alat bantu untuk mewujudkan akuntabilitas sesuai dengan fungsinya, sementara kendala utama implementasi Siskeudes yang dirasakan oleh desa berkaitan dengan SDM desa tersebut. Selanjutnya Pratiwi dan Pravasanti (2020) meneliti Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. Mereka menganalisis faktor internal dan eksternal dari sumber daya manusia yang mempengaruhi penggunaan aplikasi Siskeudes. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa persepsi kegunaan (Perceived Usefulness) dan minat (Behavioral Intention to Use) secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes.

Welley et al. (2018) melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Rondonuwu et al. (2020) melakukan penelitian serupa untuk meneliti penggunaan dan perbedaan dari pengelolaan dana desa sebelum dan setelah adanya aplikasi Siskeudes. Hasil penelitian mereka memperlihatkan penggunaan aplikasi Siskeudes telah sangat membantu untuk urusan pengelolaan dana desa dari perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh dana desa terhadap indeks perkembangan desa baik Indeks Desa Membangun (IDM) maupun Indeks Pembangunan Desa (IPD) di antaranya adalah Kuncoro et al. (2019), Maulana & Suryaningrum (2019), Yulitasari & Tyas (2020), Shalsabellah (2020), dan Aji & Qibthiyah (2021).

Hasil penelitian Kuncoro et al. (2019) menyatakan bahwa Desa Balesari di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang mendapatkan nilai IPD sebesar 48,72119, sehingga masih berstatus sebagai desa tertinggal. Selanjutnya, penelitian Maulana & Suryaningrum (2019) memperlihatkan adanya peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Desa pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara kondisi sebelum dan setelah bergulirnya.

Dana Desa. Akan tetapi, angka kemiskinan pada kondisi setelah bergulirnya dana desa ternyata tidak mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan angka kemiskinan pada kondisi sebelum adanya dana desa. Dana desa dapat memberikan pengaruh yang berbeda pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Hasil penelitian Yulitasari & Tyas (2020) menunjukkan bahwa perubahan besaran Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan status desa menurut IDM di Provinsi Jawa Tengah. Sementara hasil penelitian Shalsabellah (2020) dengan objek studi Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh dengan nilai sebesar 64,4% dalam peningkatan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD). Kemudian penelitian Aji & Qibthiyah (2021) menunjukkan bahwa Dana Desa berdampak secara parsial signifikan ($\alpha=1\%$) terhadap perkembangan status desa menurut IPD per kabupaten/kota di Indonesia.

Pada negara berkembang terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan desa, salah satunya melalui penyediaan modal bergulir di tingkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Boonperm et al. (2013) adalah salah satu contoh penelitian yang mengangkat topik tentang penggunaan dana desa melalui program Dana Desa dan Perkotaan pada tahun 2001. Program tersebut berhasil menyediakan modal kerja bagi asosiasi kredit

bergilir yang dijalankan secara lokal. Selanjutnya Lewis (2015) melakukan penelitian tentang permasalahan pada formulasi Dana Desa yang digunakan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Hasil penelitian Lewis (2015) adalah formulasi dana desa sudah mempertimbangkan heterogenitas dari setiap desa, yakni memperhitungkan kemampuan desa dalam mengumpulkan pendapatan.

Berdasarkan beberapa literatur terdahulu yang membahas mengenai implementasi Siskeudes, unit analisis yang digunakan paling tinggi di tingkat satu provinsi. Kemudian beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh dana desa terhadap indeks perkembangan desa masih memiliki beberapa keterbatasan dari sisi jumlah sampel yang bersifat lokal (paling tinggi pada level satu provinsi) dan minimnya variabel kontrol yang dipergunakan dalam penelitian. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pengaruh implementasi Siskeudes terhadap perkembangan status desa dengan unit analisis kabupaten/kota di Indonesia dan variabel sosial ekonomi maupun dummy Pulau-Tahun sebagai variabel control.

3. Metode Penelitian

Metode analisis yang ideal untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Arifin et al. (2020), yaitu memakai metode First Difference dan Difference-in-Difference (DiD). Asumsi parallel trend sebagai syarat penggunaan metode DiD, tidak dapat dipenuhi karena tidak ada kategori kelurahan atau UPT seperti pada desa sebagai variabel utama penelitian. Berdasarkan kondisi tersebut, metode analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan Pooled Cross Sections (PCS) menggunakan OLS memakai metode First Difference, dengan additional fixed effect berupa island-year dummies.

Model estimasi awal dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \delta_0 dT + \beta_1 X_{it} + \beta_2 V_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana:

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Y_{it} | = | Variabel dependen (Jumlah Desa berdasarkan Status Desa per Kabupaten/Kota terdiri atas jumlah Desa Tertinggal, jumlah Desa Berkembang, dan jumlah Desa Mandiri) |
| Indeks i | = | Individu dalam penelitian, yaitu Kabupaten/Kota |
| Indeks t | = | Tahun penelitian, dalam hal ini tahun 2014 dan 2018 |
| β_0 | = | <i>Intercept</i> |
| δ_0 | = | Parameter koefisien dT |
| dT | = | Variabel <i>dummy</i> waktu, yang bernilai: 1 = periode setelah implementasi Siskeudes (tahun 2018) 0 = periode sebelum implementasi Siskeudes (tahun 2014) |
| β_1 dan β_2 | = | Parameter koefisien regresi |
| X_{it} | = | Variabel interest penelitian (Jumlah Desa yang mengimplementasikan Siskeudes per Kabupaten/ Kota) |
| V_{it} | = | Variabel kontrol berupa variabel sosial ekonomi di level Kabupaten/Kota seperti PDRB per kapita, jumlah penduduk, jumlah penduduk bekerja, dan deflator PDRB |
| ε_{it} | = | <i>Error term</i> |

Apabila ditulis ulang untuk kedua periode (tahun 2014 dan 2018) dan *dummy* waktu dimasukkan ke dalam persamaan di atas, akan diperoleh sebagai berikut:

Untuk tahun 2018 ($dT = 1$)

$$Y_{kab/kota,2018} = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 X_{kab/kota,2018} + \beta_2 V_{kab/kota,2018} + \varepsilon_{kab/kota,2018} \quad (2)$$

Untuk tahun 2014 ($dT = 0$)

$$Y_{kab/kota,2014} = \beta_0 + \beta_1 X_{kab/kota,2014} + \beta_2 V_{kab/kota,2014} + \varepsilon_{kab/kota,2014} \quad (3)$$

Apabila kedua persamaan di atas diselisihkan, akan diperoleh sebagai berikut:

$$Y_{kab/kota,2018} - Y_{kab/kota,2014} = \delta_0 + \beta_1 X_{kab/kota,2018} - \beta_1 X_{kab/kota,2014} +$$

$$\beta_2 V_{kab/kota,2018} - \beta_2 V_{kab/kota,2014} + \varepsilon_{kab/kota,2018} - \varepsilon_{kab/kota,2014}$$

$$\Delta Y = \delta_0 + \beta_1 \Delta X + \beta_2 \Delta V + \Delta \varepsilon \quad (4)$$

Persamaan 4 biasa disebut dengan *first-differenced equation* (Wooldridge, 2016). Selanjutnya dari *first-differenced equation* tersebut akan dilakukan penambahan *island-year dummies* sebagai variabel kontrol dalam rangka mengatasi masalah *unobserved variation* yang dijumpai pada dimensi Pulau-Tahun merujuk pada penelitian Kis-Katos, K., & Sparrow, R. (2015). Model estimasi yang digunakan menjadi:

$$\Delta Y = \delta_0 + \beta_1 \Delta X + \beta_2 \Delta V + \lambda + \Delta \varepsilon \quad (5)$$

di mana λ merupakan *island-year dummies* sebagai additional *fixed effect* (control).

Hubungan positif terhadap IPD dapat dihitung berdasarkan perbedaan koefisien δ_0 . Apabila nilai koefisien δ_0 positif dan signifikan secara statistik, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara implementasi Siskeudes dengan Perkembangan Status Desa. Sementara itu, nilai koefisien $\beta_1 > 0$ dapat menunjukkan dampak tambahan positif dari variabel implementasi Siskeudes terhadap Perkembangan Status Desa.

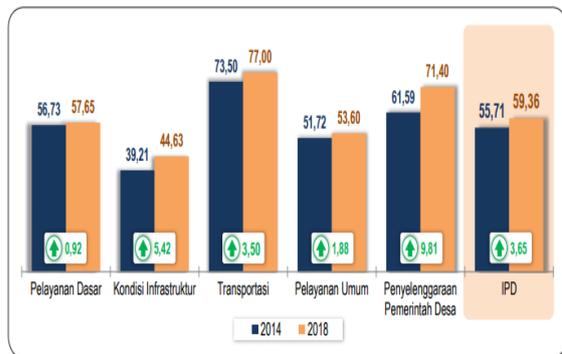
Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPKP, laman situs kominfo.go.id, dan situs bps.go.id. Kemudian untuk data variabel penjelas sosial ekonomi di level kabupaten/kota diperoleh dari BPS berupa Publikasi PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia 2014-2018 dan situs -DAPOER. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa yang diintegrasikan ke dalam level kabupaten/kota. Kondisi ideal dalam melakukan penelitian terkait dana desa adalah menggunakan unit analisis pada level desa. Akan tetapi, terdapat keterbatasan data yang diperoleh yakni cakupan data jumlah desa yang mengimplementasikan Siskeudes dan status desa berdasarkan IPD tersaji di level kabupaten/kota.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 429

kabupaten/kota untuk setiap tahun periode, sehingga total observasi untuk dua periode sebanyak 858 kabupaten/kota. Data sampel kabupaten/kota sesuai dengan publikasi Buku Indeks Pembangunan Desa 2014 dan 2018 dengan mengecualikan beberapa kabupaten yang mengalami pemekaran di tahun 2014. Data jumlah penduduk bekerja tidak tersedia untuk 18 daerah yang mengalami pemekaran (tahun 2014) dan 1 daerah yaitu Lombok Utara (tahun 2018) karena adanya gempa bumi.

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum IPD dan Status Desa. Berikut ini adalah grafik perkembangan IPD menurut dimensi penyusunnya:



Gambar 3 Perkembangan IPD Menurut Dimensi Penyusun IPD 2014 & 2018

Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa 2018

Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami kenaikan paling tinggi di antara dimensi IPD yang lainnya dengan nilai mencapai 9,81 poin. Sementara dimensi Pelayanan Dasar menjadi dimensi yang kenaikannya paling kecil dengan nilai 0,92 poin. Untuk IPD secara keseluruhan naik 3,65. Meski kenaikan maksimal masih di bawah 10 poin, hal ini tetap menunjukkan adanya perkembangan antara kedua periode tahun 2014 dengan 2018.

Perkembangan dimensi kondisi infrastruktur untuk hampir semua pulau di Indonesia masih rendah, sehingga dapat berdampak pada rendahnya nilai IPD. Selain itu, berdasarkan metode PCA oleh BPS, kontribusi

dimensi kondisi infrastruktur adalah kedua terbesar setelah dimensi Pelayanan Dasar. Apabila kedua dimensi tersebut bernilai besar, nilai IPD juga akan semakin besar.

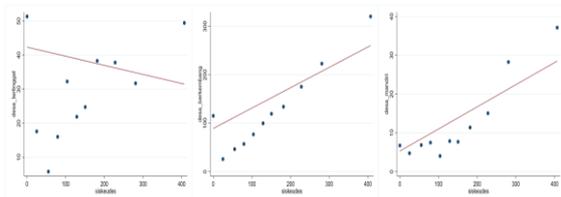
Mayoritas kondisi desa di Indonesia pada tahun 2014 berada pada kategori desa berkembang. Wilayah yang masih memiliki banyak desa tertinggal adalah Papua dan Kalimantan. Tahap perkembangan desa di Indonesia pada tahun 2018 secara nasional berada di kategori desa berkembang. Terdapat peningkatan antara kondisi tahun 2014 dengan 2018 yang ditandai dengan adanya penurunan jumlah desa tertinggal di beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ada peningkatan jumlah desa mandiri terutama di wilayah Jawa-Bali. Meskipun begitu, desa tertinggal masih banyak berada di Papua dan Kalimantan.

Terdapat kemungkinan ketimpangan perkembangan status desa antar pulau yang disebabkan karena realisasi dana desa yang lebih banyak terserap di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali. Harmadi et al. (2020) meneliti tentang kemajuan pembangunan desa apakah hasil dari kinerja pemerintah desa atau dari dampak spasial. Salah satu hasil kajiannya adalah pemusatan pembangunan desa yang dilakukan dengan pengujian auto-korelasi spasial. Hasil spatial clustering yang diperoleh adalah adanya pola pemusatan pembangunan desa berupa adanya wilayah yang mengalami pemusatan tinggi, yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Bagian barat NTB.

Hasil Estimasi Model

Assessment awal diperlukan untuk melihat distribusi dan kecenderungan data serta penaksiran dugaan awal hubungan antara variabel interest dengan variabel dependen dalam penelitian. Berikut ini merupakan unconditional plot yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan

unconditional plot pada gambar di bawah ini, dugaan awal implementasi Siskeudes dengan jumlah desa tertinggal memiliki hubungan yang negatif. Sementara implementasi Siskeudes dengan jumlah desa berkembang dan implementasi Siskeudes dengan jumlah desa mandiri memiliki hubungan yang positif.



Gambar 4 Unconditional Plot Implementasi Siskeudes dengan Status Desa menurut IPD

Analisis secara ekonomi atas hasil regresi akan dilakukan dengan melihat konsistensi setiap variabel, arti dari koefisien regresi yang dihasilkan, kesesuaian arah parameter dengan hipotesis dan signifikansi pengaruh perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Estimasi model regresi penelitian ini menggunakan bantuan program komputer Stata/MP 16.0. Berikut ini merupakan tabel statistik deskriptif yang menggambarkan variabel dependen dan variabel independen penelitian.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

| Variabel | Obs | Mean | Std. Dev | Min. | Maks. |
|---|-----|--------|----------|-------|----------|
| Variabel dependen | | | | | |
| Jumlah desa tertinggal dalam suatu kabupaten/kota | 858 | 40,16 | 67,27 | 0,00 | 540,00 |
| Jumlah desa berkembang dalam suatu kabupaten/kota | 858 | 123,19 | 98,93 | 0,00 | 702,00 |
| Jumlah desa mandiri dalam suatu kabupaten/kota | 858 | 9,90 | 16,48 | 0,00 | 122,00 |
| Variabel independen | | | | | |
| Jumlah desa yang mengimplementasikan Siskeudes dalam suatu kabupaten/kota | 858 | 80,95 | 115,62 | 0,00 | 852,00 |
| PDRB per kapita atas dasar harga konstan (dalam miliar rupiah) | 858 | 0,03 | 0,036 | 0,004 | 0,388 |
| Jumlah Penduduk (dalam ribu jiwa) | 858 | 474,89 | 587,72 | 13,49 | 5.840,90 |
| Jumlah Penduduk yang Bekerja (dalam ribu jiwa) | 839 | 226,81 | 263,17 | 4,79 | 2.356,87 |
| Deflator PDRB | 858 | 133,04 | 13,391 | 80,22 | 195,166 |

Tabel 2 Hasil Regresi First Difference

| Variabel Dependen: | (1) | (2) | (3) |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Perubahan Jumlah (Δ) | Desa Tertinggal | Desa Berkembang | Desa Mandiri |
| Variabel Independen: | | | |
| Perubahan Jumlah Desa yang mengimplementasikan Siskeudes | -0.097*** | 0.093*** | 0.016*** |
| | (0.019) | (0.018) | (0.004) |
| Variabel kontrol sosial ekonomi | Yes | Yes | Yes |
| Island-year dummies | Yes | Yes | Yes |
| Konstanta | -5.765 | 11.371* | -0.699 |
| | (7.101) | (5.821) | (1.692) |
| Observations | 410 | 410 | 410 |
| F | 9.086 | 19.360 | 24.961 |
| r ² | 0.317 | 0.458 | 0.523 |
| r ² _a | 0.298 | 0.443 | 0.510 |

Keterangan: Robust Standard errors ditunjukkan di dalam kurung

*** Signifikan pada taraf 1%, ** Signifikan pada taraf 5%,

* Signifikan pada taraf 10%

Perubahan jumlah desa yang mengimplementasikan Siskeudes sebagai variabel interest penelitian berhubungan negatif dengan perubahan jumlah desa tertinggal. Sementara perubahan jumlah desa yang mengimplementasikan Siskeudes berhubungan positif dengan perubahan jumlah desa berkembang dan desa mandiri. Hal ini berarti kenaikan jumlah implementasi Siskeudes akan mengakibatkan penurunan jumlah desa tertinggal, peningkatan jumlah desa berkembang, atau peningkatan desa mandiri. Hubungan perubahan variabel jumlah desa yang mengimplementasikan Siskeudes antar periode tahun 2014 dengan 2018 terhadap perubahan jumlah ketiga status desa tersebut signifikan secara statistik pada $\alpha = 1\%$.

Penggunaan metode First Difference, dengan additional fixed effect berupa island-year dummies dapat menghasilkan gambaran hubungan yang sebagian bersifat kausal. Penggabungan dua kelompok data cross-sectional yang dikumpulkan sebelum dan setelah terjadinya suatu kebijakan, dapat digunakan untuk menentukan efeknya secara ekonomi pada output atau outcome tertentu (Wooldridge,

2016). Hasil regresi dalam penelitian seperti tersaji pada Tabel 2 menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes memiliki dampak secara parsial terhadap perkembangan status desa.

Interpretasi hasil regresi penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1.000 desa yang mengimplementasikan Siskeudes dapat berakibat pada penurunan 97 jumlah desa tertinggal, atau kenaikan 93 jumlah desa berkembang, atau kenaikan 16 jumlah desa mandiri. Meskipun terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik, magnitude besaran koefisien regresi memiliki dampak yang relatif kecil.

Fakta menarik dari hasil regresi adalah pada koefisien konstanta atau nilai parameter δ_0 yang memperlihatkan perbedaan output (perubahan jumlah desa) antara sebelum dan sesudah pengimplementasian Siskeudes. Tanpa adanya perubahan variabel independen apa pun dalam penelitian, pengimplementasian aplikasi Siskeudes diprediksi secara signifikan dapat meningkatkan 11,37 desa berkembang (taraf $\alpha=10\%$). Secara magnitude besaran parameter δ_0 memiliki dampak yang cukup baik meskipun tidak bisa dikatakan bernilai tinggi.

Selanjutnya untuk melihat dampak implementasi Siskeudes terhadap perkembangan status desa antara daerah Jawa-Bali dan Non Jawa-Bali serta karakteristik desa yang ada di kabupaten dan kota, penulis melakukan regresi dengan membagi sampel sesuai dua kondisi tersebut.

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 3 di bawah ini, dapat diperoleh informasi bahwa implementasi Siskeudes dengan jumlah desa tertinggal memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik pada $\alpha = 1\%$ untuk wilayah Jawa-Bali dan wilayah Non Jawa-Bali.

Hubungan positif signifikan pada $\alpha = 1\%$ dijumpai antara implementasi Siskeudes dengan jumlah desa berkembang di luar Jawa-Bali,

sementara untuk wilayah Jawa-Bali justru negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Hubungan positif signifikan pada $\alpha = 1\%$ dijumpai antara implementasi Siskeudes dengan jumlah desa mandiri di Jawa-Bali. Hubungan antara implementasi Siskeudes dengan jumlah desa mandiri di wilayah luar Jawa-Bali positif tetapi tidak signifikan.

Peningkatan implementasi Siskeudes memiliki korelasi kuat terhadap penurunan jumlah desa tertinggal untuk semua wilayah (Jawa-Bali maupun Non Jawa-Bali). Korelasi kuat antara kenaikan dana desa dengan kenaikan jumlah desa berkembang dijumpai untuk wilayah Non Jawa-Bali, sementara korelasi kuat antara kenaikan dana desa dengan kenaikan jumlah desa mandiri dijumpai untuk wilayah Jawa-Bali.

Hubungan negatif signifikan antara perubahan implementasi Siskeudes dengan desa berkembang belum tentu buruk karena berdasarkan penelusuran data penurunan jumlah desa berkembang, ternyata sebagian besar desa berkembang naik status ke desa mandiri.

Hasil regresi pada penelitian ini mendukung peta sebaran perkembangan status desa yang diperoleh dari Publikasi Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 dan Hasil Pendataan Potensi Desa tahun 2018 terbitan BPS.

Tabel 3 Hasil Regresi *First Difference* Sampe Jawa-Bali vs Non Jawa-Bali

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | Desa Tertinggal | | Desa Berkembang | | Desa Mandiri | |
| Perubahan Jumlah Desa yang mengimplementasikan Siskeudes | -0.022** 0.002** | -0.131** 0.002** | -0.025** 0.002** | 0.144*** 0.002** | 0.047** 0.002** | 0.002 0.002 |
| | (0.007) | (0.023) | (0.012) | (0.019) | (0.010) | (0.002) |
| Variabel kontrol sosial ekonomi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| <i>Island-year dummies</i> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Konstanta | -4.730 (4.331) | -9.514 (6.145) | 1.620 (10.030) | 9.990** (4.432) | 3.345 (7.441) | 0.756 (0.754) |
| Sampel | Jawa-Bali | Non Jawa-Bali | Jawa-Bali | Non Jawa-Bali | Jawa-Bali | Non Jawa-Bali |
| Observations | 94 | 316 | 94 | 316 | 94 | 316 |
| F | 3.861 | 5.696 | 4.605 | 8.291 | 8.793 | 23.727 |
| r2 | 0.147 | 0.343 | 0.156 | 0.454 | 0.293 | 0.363 |
| r2_a | 0.098 | 0.322 | 0.108 | 0.436 | 0.253 | 0.342 |

Keterangan: Robust Standard errors ditunjukkan di dalam kurung
 *** Signifikan pada taraf 1%, ** Signifikan pada taraf 5%, * Signifikan pada taraf 10%

Interpretasi hasil regresi penelitian menandakan bahwa setiap kenaikan 1.000 desa yang mengimplementasikan Siskeudes dapat berakibat pada penurunan 22 jumlah desa tertinggal (wilayah Jawa-Bali) atau penurunan 131 jumlah desa tertinggal (wilayah Non Jawa-Bali). Perubahan implementasi Siskeudes berkorelasi lebih kuat dan berdampak lebih besar terhadap perubahan jumlah desa tertinggal di wilayah luar Jawa-Bali. Meskipun begitu, secara magnitude besaran koefisien regresi memiliki dampak yang relatif kecil.

Kemudian, setiap kenaikan 1.000 desa yang mengimplementasikan Siskeudes dapat berakibat pada peningkatan 144 jumlah desa berkembang (wilayah Non Jawa-Bali) atau kenaikan 47 jumlah desa mandiri (wilayah Jawa-Bali). Jadi, implementasi Siskeudes memiliki dampak yang lebih besar terhadap perubahan jumlah desa berkembang di wilayah luar Jawa-Bali dan perubahan jumlah desa mandiri di wilayah Jawa-Bali. Meskipun begitu, secara magnitude besaran koefisien regresi tersebut memiliki dampak yang relatif kecil.

Hasil regresi dengan pembagian sampel menjadi kabupaten dan kota seperti tersaji pada Tabel 4 di bawah ini. Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa secara statistik hubungan antara implementasi Siskeudes dengan ketiga status desa di wilayah kabupaten signifikan pada $\alpha = 1\%$. Perubahan implementasi Siskeudes berhubungan negatif dengan perubahan jumlah desa tertinggal dan berhubungan positif dengan perubahan jumlah desa berkembang dan jumlah desa mandiri.

Implementasi Siskeudes memiliki dampak yang kuat terhadap perkembangan status desa yang ada di wilayah kabupaten. Sementara untuk dampak implementasi Siskeudes terhadap perkembangan status desa di wilayah kota hanya signifikan pada $\alpha = 10\%$ untuk desa tertinggal. Hal ini cukup logis karena jumlah sampel desa di

wilayah kota jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah kabupaten.

Interpretasi hasil regresi untuk wilayah kabupaten adalah setiap kenaikan 1.000 desa yang mengimplementasikan Siskeudes dapat berakibat pada penurunan 97 jumlah desa tertinggal, atau kenaikan 92 jumlah desa berkembang, atau kenaikan 15 jumlah desa mandiri. Meskipun signifikan secara statistik, magnitude koefisien regresi tersebut memiliki dampak yang relatif kecil.

Kesesuaian hasil estimasi dengan dugaan awal terpenuhi untuk dampak secara parsial yang signifikan pada taraf $\alpha=1\%$ variabel interest yaitu implementasi Siskeudes terhadap ketiga status desa (desa tertinggal, desa berkembang, desa mandiri). Kemudian untuk parameter δ_0 yang menggambarkan perbedaan output antara sebelum dan sesudah pengimplementasian Siskeudes, juga telah sesuai dengan hipotesis untuk pengaruhnya terhadap desa berkembang.

Tabel 4 Hasil Regresi First Difference Sampel Kabupaten vs Kota

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | Desa Tertinggal | | Desa Berkembang | | Desa Mandiri | |
| Perubahan Jumlah Desa yang mengimplementasikan Siskeudes | -0.097*** | -0.139* | 0.092*** | 0.064 | 0.015*** | 0.090 |
| | (0.020) | (0.073) | (0.019) | (0.119) | (0.004) | (0.052) |
| Variabel kontrol sosial ekonomi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Island-year dummies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Konstanta | -6.421 (7.423) | 8.390 (9.216) | 12.646** (6.015) | -12.228 (15.190) | -0.886 (1.739) | 4.148 (6.635) |
| Sampel | Kab. | Kota | Kab. | Kota | Kab. | Kota |
| Observations | 391 | 19 | 391 | 19 | 391 | 19 |
| F | 9.713 | . | 20.391 | . | 24.993 | . |
| r2 | 0.318 | 0.550 | 0.471 | 0.405 | 0.531 | 0.552 |
| r2_a | 0.298 | 0.099 | 0.456 | -0.191 | 0.517 | 0.104 |

Keterangan: Robust Standard errors ditunjukkan di dalam kurung

*** Signifikan pada taraf 1%, ** Signifikan pada taraf 5%, * Signifikan pada taraf 10%

5. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan studi empiris yang mencoba mendapatkan bukti mengenai dampak implementasi Siskeudes terhadap Perkembangan Status Desa per Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan variabel interest penelitian (jumlah desa yang mengimplementasikan Siskeudes) berdampak secara parsial signifikan pada tingkat $\alpha=1\%$ terhadap ketiga status desa (desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri). Peningkatan implementasi Siskeudes akan mengakibatkan penurunan jumlah desa tertinggal, penambahan jumlah desa berkembang, atau penambahan jumlah desa mandiri. Tanpa adanya perubahan variabel independen apa pun yang digunakan dalam penelitian, pengimplementasian Siskeudes diprediksi secara signifikan dapat menaikkan 11,37 desa berkembang.

Pengujian koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian mampu menjelaskan variasi status desa sebesar masing-masing 29,80% (desa tertinggal), 44,30% (desa berkembang), dan 51,00% (desa mandiri). Hal ini menandakan variabel dalam model penelitian sebenarnya cukup baik dalam menjelaskan pengaruh antara variabel independen penelitian dengan perkembangan status desa di Indonesia. Akan tetapi, kemungkinan masih terdapat variabel lain diluar model yang mampu menjelaskan variasi status desa dengan lebih baik. Misalnya seperti dampak spasial berupa neighborhood effect, yaitu pembangunan kawasan pedesaan secara bertetangga dan juga kebijakan pemerintah di atas pemerintah desa yang dapat berdampak signifikan bagi kemajuan pembangunan desa (Harmadi et al., 2020).

Implementasi Siskeudes memiliki dampak secara parsial yang kuat terhadap penurunan jumlah desa tertinggal untuk semua wilayah, baik di Jawa-Bali maupun Non Jawa-Bali.

Implementasi Siskeudes memiliki dampak yang lebih besar terhadap kenaikan jumlah desa berkembang di wilayah luar Jawa-Bali dan kenaikan jumlah desa mandiri di wilayah Jawa-Bali. Hasil regresi untuk sampel kabupaten dan kota menunjukkan dampak secara parsial yang kuat (signifikan pada taraf $\alpha=1\%$) implementasi Siskeudes terhadap perkembangan status desa yang ada di wilayah kabupaten. Secara keseluruhan, besaran koefisien regresi memiliki dampak yang relatif kecil meskipun pengaruh implementasi Siskeudes terhadap jumlah desa signifikan secara statistik.

Beberapa saran atas hasil penelitian ini adalah Pemerintah perlu mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dengan cara menitikberatkan pada peningkatan dimensi kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar. Sebab kedua dimensi tersebut merupakan kontributor terbesar bagi penyusunan nilai IPD yang menjadi penentu kemajuan status desa. Kemudian implementasi Siskeudes diharapkan dapat diterapkan untuk seluruh desa di Indonesia dengan disertai pengawalan yang baik dari berbagai pihak seperti BPKP, Kementerian terkait, APIP Pemda, maupun pemerintah desa itu sendiri.

Penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan terkait dengan keterbatasan unit analisis, jumlah observasi, dan periode observasi penelitian. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan unit analisis yang lebih kecil pada level desa, penggunaan periode data yang lebih panjang, dan penambahan variabel kontrol lainnya yang sesuai.

6. Referensi

- Aji, Y.I.T., & Qibthiyah, R. M. (2021). *Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia*. S2 Thesis. Universitas Indonesia.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty,

- S. A., ... & Handoko, R. (2020). *Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia*. *Journal of Rural Studies*, 79, 382-394.
- Badan Pusat Statistik RI. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018*. *Berita Resmi Statistik*, No. 99/12/Th. XXI, 10 Desember 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik RI. (2019). *Indeks Pembangunan Desa 2018*. © BPS RI, ISBN : 978-602-438-275-9 No. Publikasi 04310.1901.
- Badan Pusat Statistik RI. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2014 - 2018*. © BPS RI, ISSN : 1907-8242 No. Publikasi 07140.1907.
- Bappenas. (2015). *Modul Penghitungan Indeks Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Boonperm, J., Haughton, J., & Khandker, S. R. (2013). *Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on incomes and spending*. *Journal of Asian Economics*, 25, 3-16.
- BPKP. (2019). *Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES*. Online: bpkp.go.id. Diakses pada 21 Mei 2021. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desabpkp>
- Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., Adji, A. *Kemajuan Pembangunan Desa: Kinerja Pemerintah Desa atukah Dampak Spasial?. TNP2K Working Paper 52/2020*. Jakarta, Indonesia.
- ICW. (2018). *ICW Temukan 252 Kasus Korupsi Dana Desa Sepanjang 2015-2018*. Online: Tirto.id. Diakses pada 21 Mei 2021. <https://tirto.id/icw-temukan-252-kasus-korupsi-dana-desa-sepanjang-2015-2018-eILQ>
- ICW. (2018). *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*. Online: Antikorupsi.org. Diakses pada 22 Mei 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- INDO-DAPOER. (2019). *Indonesia Database for Policy and Economic Research*. Diakses pada 16 Oktober 2020. <https://knoema.com/WBINDDPER2018/indonesia-database-for-policy-and-economic-research-indo-dapoer>.
- Kementerian Kominfo, R. I. (2017). *BPKP Konsisten Mengawal Keuangan Desa*. Online: kominfo.go.id. Diakses pada 21 Mei 2021. https://kominfo.go.id/content/detail/9658/bpkp-konsisten-mengawal-keuangan-desa/0/artikel_gpr.
- Kementerian Kominfo, R. I. (2018). *Aplikasi Siskeudes untuk Transparansi Keuangan Desa*. Online: kominfo.go.id. Diakses pada 21 Mei 2021. https://kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr.
- Kis-Katos, K., & Sparrow, R. (2015). *Poverty, labor markets and trade liberalization in Indonesia*. *Journal of development Economics*, 117, 94-106.
- Kuncoro, B., Nugraha, J. T., & Ahsani, R. D. (2019). *Pengembangan Potensi Destinasi Wisata Menggunakan IPD di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang*. *Journal of Public Administration and Local Governance, JPALG VOL 3 (2)*. p-ISSN: 2614- 4433.
- Lewis, B. D. (2015). *Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes*, *Public Administration and Development*, 35.5: 347-359.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). *Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Maulana, A., & Suryaningrum, N. (2019). *Efektivitas dana desa di kabupaten hulu sungai tengah*. *KINERJA*, 16(2), 139-146.
- Nafi'ah, N. K. (2018). *Implementasi Dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). *Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 217-223.
- Rondonuwu, R., Sumual, T. E., & Kewo, C. L. (2020). *Penggunaan Aplikasi Sistem*

- Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Kayuwuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 56-65.
- Shalsabellah, G. (2020). *Dampak Pengalokasian Dana Desa Dalam Pencapaian Kinerja Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2018*. S1 Thesis. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2018). *Peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa Kabakaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
- Welley, M. M., Koleangan, R. A., & Kawung, G. M. (2018). *Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19(4), 79-91.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory econometrics: A modern approach*, Sixth Edition. Nelson Education.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). *Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah*. *Journal of Regional and Rural Development Planning* (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan), 4(2), 74-83.